



Efektivitas Program MBG Sebagai Kebijakan Publik Nasional

Nuryadin¹, Yuliana², Andhita Kartiwa³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : bimayadin510@gmail.com, yuli20082006@gmail.com,
kartiwaandhita@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 26 Juni 2026

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national public policy aimed at improving the quality of nutrition, health, and education for the community, particularly students. This study aims to analyze the effectiveness of the MBG Program as a national public policy and identify factors influencing its successful implementation. The research method used is normative legal research with a legislative approach through a review of various regulations, scientific journals, and relevant literature. The results indicate that the MBG Program has a positive impact on improving children's nutritional needs, student learning concentration, community welfare, and supports government efforts to reduce stunting and malnutrition. However, program implementation still faces various obstacles, such as unequal distribution of aid, budget constraints, weak inter-agency coordination, and suboptimal oversight. Therefore, evaluation, strengthening governance, transparency, and community participation are needed to ensure the MBG Program runs more effectively and sustainably.

Keywords: effectiveness, public policy, Free Nutritious Meal Program, community nutrition, social welfare.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan publik nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program MBG sebagai kebijakan publik nasional serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap berbagai regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemenuhan gizi anak, konsentrasi belajar siswa, kesejahteraan masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan gizi buruk. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang optimalnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi, penguatan tata kelola, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar Program MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : efektivitas, kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis, gizi masyarakat, kesejahteraan sosial.

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa tahun terakhir semakin terlihat melalui berbagai kebijakan di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu program yang mendapat perhatian luas ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk membantu menyediakan asupan nutrisi bagi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Kehadiran program ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya persoalan stunting, gizi buruk, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap makanan sehat dan bergizi di berbagai wilayah Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan anak, tetapi juga dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Apabila tidak ditangani secara serius, situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas generasi penerus bangsa pada masa mendatang. Melalui Program MBG, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pangan yang layak sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. (Nurulaini & Afifah, 2025)

Hingga saat ini, persoalan pemenuhan gizi masyarakat masih menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil maupun kelompok dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh makanan bergizi secara memadai. Kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup luas, khususnya terhadap kesehatan anak dan kemampuan mereka dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Anak-anak yang mengalami kekurangan asupan nutrisi umumnya lebih rentan terhadap penyakit dan cenderung mengalami penurunan daya konsentrasi saat menerima materi pembelajaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu kesehatan, melainkan juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan dan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Program MBG sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Fatimah et al., 2024)

Meskipun memiliki tujuan yang sangat strategis, implementasi Program MBG masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sejumlah daerah masih mengalami keterbatasan anggaran, kendala dalam proses distribusi makanan, serta belum optimalnya sistem pengawasan terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Di samping itu, koordinasi antarinstansi pemerintah belum sepenuhnya berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target program. Perbedaan kemampuan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan ini. Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menjalankan dan mengawasi program secara efektif. Dengan demikian, diperlukan evaluasi yang komprehensif guna

mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas Program MBG sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat. (Zulaika et al., 2025)

Dalam perspektif kebijakan publik, tingkat efektivitas suatu program dapat dilihat dari kemampuan program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Suatu kebijakan dianggap efektif apabila mampu memberikan manfaat nyata kepada kelompok sasaran serta menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Ketersediaan asupan gizi yang memadai diharapkan dapat membantu peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik dan memperoleh hasil belajar yang optimal. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap efektivitas Program MBG menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang. (Nango et al., 2025)

Penelitian mengenai Program MBG juga tidak dapat dilepaskan dari teori implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada pentingnya aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan suatu program pemerintah. Efektivitas pelaksanaan Program MBG sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah, kompetensi tenaga pelaksana, dan partisipasi masyarakat sebagai pihak yang turut merasakan dampak kebijakan tersebut. Ketika salah satu unsur tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencapaian tujuan program menjadi sulit diwujudkan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia maupun minimnya fasilitas pendukung dapat menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Di sisi lain, komunikasi yang kurang efektif antar pihak terkait juga dapat memunculkan berbagai kesalahpahaman dalam proses implementasi program. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai faktor implementasi menjadi hal yang penting dalam mengkaji efektivitas Program MBG sebagai salah satu kebijakan publik nasional. (Basuki et al., 2026)

Berbagai penelitian terdahulu mengenai Program MBG umumnya lebih banyak menyoroti pelaksanaan program dan dampaknya terhadap peserta didik di lingkungan sekolah. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi belajar serta memperbaiki kondisi kesehatan anak. Selain manfaat tersebut, penyediaan makanan bergizi di sekolah juga dinilai mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Akan tetapi, pelaksanaan program masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi makanan dan keterbatasan fasilitas penunjang di beberapa daerah. Perbedaan kondisi geografis serta tingkat kesiapan lembaga pelaksana turut memengaruhi pemerataan implementasi kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas Program MBG masih diperlukan agar

pelaksanaannya dapat berlangsung secara lebih optimal dan tepat sasaran.(Febryanti et al., 2025)

Kajian lainnya mengemukakan bahwa Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan penguatan ketahanan nasional. Program ini dipandang sebagai salah satu bentuk investasi negara dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas demi mendukung kepentingan nasional dalam jangka panjang. Peningkatan status kesehatan masyarakat diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia yang unggul merupakan modal penting bagi bangsa dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan gizi melalui Program MBG dapat dipahami sebagai langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian, keberadaan program ini memiliki arti penting, baik dari aspek sosial maupun dalam konteks pembangunan nasional secara lebih luas.(Nasional & Kabupaten, 2025)

Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Program MBG. Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan, dibutuhkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan selama program berlangsung. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan makanan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara program. Kehadiran mekanisme pengawasan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, aspek pengawasan memiliki posisi yang sangat menentukan dalam mendukung efektivitas Program MBG sebagai bagian dari kebijakan publik nasional.(Bangsaratu & Edi, 2025)

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek implementasi program di tingkat sekolah, dampaknya terhadap peningkatan gizi peserta didik, serta pengaruhnya terhadap proses pembelajaran dan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan empiris dengan ruang lingkup yang terbatas pada wilayah tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas Program MBG sebagai kebijakan publik nasional. Selain itu, kajian yang menghubungkan efektivitas Program MBG dengan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya melalui perspektif hukum dan kebijakan publik masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas Program MBG sebagai instrumen kebijakan publik nasional dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya dalam kerangka penelitian hukum normatif. Adapun novelty penelitian ini terletak

pada upaya untuk mengintegrasikan analisis efektivitas kebijakan dengan identifikasi faktor-faktor implementasi Program MBG berdasarkan kajian normatif terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan konsep kebijakan publik yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana tujuan Program MBG dapat tercapai, tetapi juga menjelaskan berbagai aspek yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga evaluasi terhadap efektivitas dan tata kelola pelaksanaannya diperlukan sebagai dasar perbaikan kebijakan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata, berkelanjutan, dan tepat sasaran. (Andi Weyana Nurul Khatimah et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program MBG sebagai kebijakan publik nasional serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Penelitian ini melahirkan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik nasional. Kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi efektivitas program pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola, pengawasan, serta mekanisme implementasi Program MBG agar dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya kajian ini, Program MBG diharapkan dapat terus disempurnakan sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul "Efektivitas Program MBG sebagai Kebijakan Publik Nasional" adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, ketahanan pangan, kesehatan, dan pelaksanaan program MBG di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan instrumen hukum terkait Program MBG, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang

berhubungan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan seluruh bahan hukum secara sistematis guna memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas Program MBG sebagai kebijakan publik nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sebagai Kebijakan Publik Nasional

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dirancang untuk mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya peserta didik. Kehadiran program ini tidak semata-mata bertujuan menyediakan makanan bagi anak-anak di sekolah, melainkan juga menjadi upaya strategis untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Asupan nutrisi yang memadai diketahui berpengaruh terhadap kondisi fisik, daya tahan tubuh, kemampuan kognitif, serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu, Program MBG dapat dipahami sebagai investasi sosial jangka panjang yang diarahkan untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan terkait gizi di sejumlah daerah di Indonesia, program ini menjadi salah satu instrumen negara dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan demikian, efektivitas Program MBG perlu dinilai tidak hanya berdasarkan banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. (Nurulaini & Afifah, 2025)

Program MBG memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kesejahteraan sosial yang menjadi bagian penting dalam kebijakan publik. Dalam perspektif tersebut, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pangan yang sehat dan bernilai gizi. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi tanpa dipengaruhi kondisi ekonomi keluarganya. Kebijakan tersebut menjadi semakin relevan mengingat masih terdapat banyak daerah, khususnya wilayah terpencil dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas. Dengan demikian, pelaksanaan MBG merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat di bidang kesehatan dan pangan. Selain itu, program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, MBG dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan generasi muda Indonesia secara berkelanjutan. (Zubaedah & Negara, 2025)

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan publik pada umumnya ditentukan oleh sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam praktik. Dalam kajian kebijakan publik, efektivitas dipahami sebagai kemampuan suatu program untuk menghasilkan manfaat sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan. Pada Program MBG, ukuran efektivitas dapat diamati melalui perbaikan kondisi kesehatan siswa, menurunnya angka kekurangan gizi, serta meningkatnya kemampuan konsentrasi selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan program ini tidak terbatas pada penyediaan makanan secara gratis, melainkan juga diarahkan untuk membentuk generasi yang sehat, berkualitas, dan produktif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap MBG perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penilaian yang komprehensif diperlukan agar dapat diketahui apakah manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok sasaran dan mampu menjawab persoalan yang menjadi latar belakang pembentukannya. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai secara nyata, maka MBG dapat dinilai efektif sebagai salah satu kebijakan publik nasional. (Nango et al., 2025)

Pelaksanaan Program MBG juga memiliki hubungan yang kuat dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Pembangunan sumber daya manusia ditempatkan sebagai agenda prioritas karena menjadi faktor penentu daya saing bangsa di masa depan. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi yang memadai sejak usia dini cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik serta kemampuan belajar yang lebih optimal dibandingkan mereka yang mengalami kekurangan nutrisi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak strategis bagi pembangunan nasional dalam jangka panjang. Pemerintah memandang kualitas gizi sebagai salah satu unsur utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, generasi muda Indonesia diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai sektor pembangunan. Oleh sebab itu, tingkat efektivitas MBG akan berpengaruh besar terhadap kualitas generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang. (Nasional & Kabupaten, 2025)

Berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan hasil positif dari pelaksanaan Program MBG terhadap kesehatan peserta didik. Program ini memperluas akses anak-anak terhadap makanan yang mengandung nutrisi seimbang sesuai kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bagi sebagian peserta didik yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam memperoleh makanan sehat, MBG menjadi sarana penting untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Dampak yang muncul dapat dilihat dari meningkatnya energi, kebugaran fisik, serta semangat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kondisi kesehatan yang semakin baik juga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kehadiran siswa karena mereka lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, program ini memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dengan mengurangi sebagian beban pengeluaran untuk kebutuhan makan anak. Oleh karena itu, manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. (Febryanti et al., 2025)

Kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dapat dinilai melalui dampaknya terhadap kesejahteraan peserta didik. Kesejahteraan tersebut tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, perkembangan mental, serta kemampuan akademik anak. Peserta didik yang memperoleh asupan nutrisi secara teratur cenderung memiliki kondisi fisik yang lebih baik sehingga mampu mengikuti kegiatan belajar dengan lebih optimal. Ketersediaan makanan bergizi turut berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan psikologis yang mendukung proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan siswa. Ketika kebutuhan nutrisi terpenuhi, kemampuan siswa dalam memahami pelajaran dan berpartisipasi dalam aktivitas sekolah akan meningkat. Oleh karena itu, Program MBG dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. (Andi Weyana Nurul Khatimah et al., 2025)

Dalam perspektif hukum tata negara, Program MBG merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Sebagai penyelenggara pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok yang layak. Hak atas kesehatan dan pangan merupakan bagian dari hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah. Melalui implementasi MBG, negara berupaya mewujudkan komitmen tersebut melalui kebijakan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Program ini sekaligus mencerminkan penerapan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, berbagai program sosial menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan MBG tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga pada kemampuannya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. (Sari et al., 2026)

Pelaksanaan Program MBG sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Konsep tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu program publik akan lebih mudah dicapai apabila seluruh tahapan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks MBG, keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan diperlukan agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Keterbukaan informasi mengenai mekanisme dan pelaksanaan program juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas Program MBG. (Governance & Kualitatif, 2025)

Manfaat Program MBG juga terlihat secara nyata dalam mendukung proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Kondisi kesehatan peserta didik yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Siswa yang memperoleh asupan gizi yang cukup umumnya memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik dibandingkan mereka yang mengalami kekurangan nutrisi. Keadaan tersebut mendorong peningkatan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, suasana belajar di sekolah menjadi lebih kondusif karena peserta didik berada dalam kondisi fisik yang lebih siap untuk menerima materi pelajaran. Guru pun dapat menjalankan proses pembelajaran dengan lebih efektif ketika siswa memiliki tingkat fokus yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan MBG memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. (Risnawati et al., 2025)

Dampak Program MBG tidak hanya dirasakan dalam sektor pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Sebuah kebijakan publik yang efektif umumnya mampu menghasilkan efek lanjutan yang menjangkau berbagai bidang kehidupan. Melalui program ini, banyak keluarga memperoleh keringanan karena sebagian kebutuhan makan anak telah ditanggung oleh pemerintah. Di sisi lain, pelaksanaan MBG turut menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan dan distribusi makanan. Aktivitas tersebut dapat meningkatkan perputaran ekonomi daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, manfaat program tidak terbatas pada peserta didik sebagai penerima utama, melainkan juga dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki dampak yang bersifat multidimensional apabila dikelola secara optimal. (Yulia et al., 2025)

Program MBG merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Kedua sektor tersebut berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah berupaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat. Kehadiran MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan kesehatan dan pendidikan antar daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional. (Pembangunan et al., n.d.)

Dukungan masyarakat terhadap Program MBG menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. Banyak orang tua menilai program ini memberikan manfaat nyata karena membantu memastikan anak-anak mereka memperoleh makanan yang sehat selama berada di sekolah. Tingkat penerimaan yang tinggi mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bidang

gizi dan kesehatan anak. Selain memberikan manfaat langsung, keterlibatan masyarakat juga berkontribusi dalam proses pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program. Partisipasi tersebut dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Semakin besar dukungan yang diberikan masyarakat, semakin besar pula peluang keberhasilan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dengan demikian, dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat efektivitas Program MBG. (Nabila Putri Ananta et al., 2025)

Secara umum, Program MBG dapat dinilai sebagai kebijakan publik yang memiliki prospek besar dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, manfaatnya telah mulai dirasakan oleh peserta didik maupun masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran MBG menunjukkan bahwa negara berupaya menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, dan tata kelola yang baik, program ini berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaannya juga sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya. Oleh sebab itu, penguatan efektivitas program perlu terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Hastuti & Hariyadi, 2026)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan kebijakan yang telah disusun pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada keberhasilan implementasinya di lapangan. Meskipun program ini dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan secara optimal. Salah satu persoalan yang paling sering ditemukan adalah belum meratanya distribusi makanan ke seluruh wilayah penerima manfaat, terutama di daerah terpencil. Karakteristik geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda menjadi kendala tersendiri dalam proses penyaluran bantuan. Di sejumlah daerah, keterbatasan akses transportasi dan kondisi jalan yang kurang memadai menyebabkan distribusi bahan pangan sering mengalami keterlambatan. Keadaan tersebut dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima masyarakat sekaligus mengurangi manfaat program yang seharusnya diperoleh secara maksimal. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam mengatasi hambatan distribusi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan Program MBG. (Fatimah et al., 2024)

Ketersediaan dan pengelolaan anggaran merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Program MBG. Sebagai kebijakan yang diterapkan secara nasional, program ini memerlukan alokasi dana yang besar untuk menjamin pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Apabila pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tidak berjalan efektif, maka potensi terjadinya penyalahgunaan dana akan semakin besar dan dapat menghambat pencapaian tujuan program. Selain itu, keterbatasan kemampuan fiskal di beberapa daerah juga sering memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan. Dampaknya dapat terlihat pada berkurangnya kualitas bahan makanan, terbatasnya jumlah penerima manfaat, maupun terganggunya kesinambungan program dalam jangka panjang. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan serta pengelolaan keuangan yang efisien menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keberhasilan Program MBG. (Zulaika et al., 2025)

Keberhasilan implementasi Program MBG juga sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antarinstitusi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Program ini tidak dapat dijalankan oleh satu lembaga saja karena melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dalam praktiknya, kurangnya sinkronisasi dan komunikasi antar pihak sering menimbulkan perbedaan dalam penerapan kebijakan di berbagai daerah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada ketidakefektifan distribusi bantuan maupun lemahnya sistem pengawasan program. Bahkan, tidak jarang ditemukan tumpang tindih tugas dan kewenangan yang menyebabkan proses pelaksanaan menjadi kurang efisien. Agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal, setiap pihak perlu memahami fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing secara jelas. Oleh sebab itu, koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Program MBG. (Aktor, 2026)

Kapasitas lembaga pelaksana merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas pelaksanaan Program MBG. Pada kenyataannya, tidak seluruh sekolah atau institusi pelaksana memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung jalannya program, seperti dapur yang memenuhi standar kesehatan, ruang penyimpanan makanan, maupun tenaga pengelola yang terlatih. Perbedaan tingkat kesiapan tersebut menyebabkan pelaksanaan program di setiap daerah tidak selalu berjalan dengan kualitas yang sama. Jika sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas, maka pencapaian tujuan kebijakan akan menghadapi berbagai hambatan. Selain fasilitas fisik, kompetensi sumber daya manusia juga memegang peran penting karena mereka bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan makanan dan proses distribusinya. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar kualitas pelayanan dapat terjaga. Dengan kesiapan kelembagaan yang baik, pelaksanaan Program MBG akan lebih efektif dan mampu memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat. (Fajrin et al., 2026)

Komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Program MBG. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang

jelas mengenai tujuan, manfaat, serta tata cara pelaksanaan program agar dapat memahami urgensi kebijakan tersebut. Ketika informasi disampaikan secara tepat, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi yang tidak efektif dapat memunculkan kesalahpahaman bahkan menimbulkan penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital, informasi yang tidak benar mengenai program dapat dengan cepat menyebar dan membentuk opini negatif. Situasi ini berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan apabila tidak segera diantisipasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang terencana dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga dukungan masyarakat terhadap Program MBG. (Pujiyanto & Solihat, 2026)

Selain faktor komunikasi, persepsi masyarakat terhadap Program MBG juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Sebagian besar masyarakat menilai program ini sebagai langkah positif karena dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah. Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang mempertanyakan kualitas pelaksanaan maupun manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Perbedaan pandangan tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya kebijakan. Jika keraguan yang muncul tidak ditangani dengan baik, maka dukungan publik terhadap program berpotensi mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menunjukkan hasil nyata dari pelaksanaan Program MBG melalui kebijakan yang konsisten, transparan, dan terbuka terhadap evaluasi. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, keberlangsungan dan efektivitas program akan lebih mudah diwujudkan dalam jangka panjang. (Sabatimy & Ardedia, 2026)

Tingkat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Pada umumnya, suatu kebijakan publik akan lebih mudah dilaksanakan apabila memperoleh penerimaan dan dukungan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan MBG, kepercayaan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Ketika program mampu memberikan dampak positif terhadap pemenuhan gizi dan kesejahteraan peserta didik, masyarakat cenderung memberikan dukungan yang lebih besar. Sebaliknya, apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi publik, maka kepercayaan terhadap pemerintah dapat berkurang. Dukungan yang lahir dari legitimasi yang kuat akan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat berkaitan dengan tingkat penerimaan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. (Kebijakan Publik Di Era Disinformasi Studi Sosiologis Tentang et al., 2025)

Pembentukan opini masyarakat terhadap Program MBG tidak terlepas dari pengaruh media massa dan media sosial. Informasi yang disebarluaskan melalui berbagai platform komunikasi memiliki kemampuan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan pemerintah. Berita yang bernada positif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan pemberitaan yang

bersifat kritis atau negatif dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas program. Di era digital saat ini, arus informasi bergerak sangat cepat sehingga masyarakat sering kali menerima berbagai informasi dalam waktu yang bersamaan. Apabila informasi yang beredar tidak akurat atau tidak berimbang, maka dapat muncul kesalahpahaman yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap program. Selain berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, media juga berperan sebagai instrumen pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang jelas, objektif, dan mudah dipahami menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. (Syafaatu Azzahra et al., 2025)

Dalam kerangka pemerintahan yang menerapkan prinsip desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan Program MBG. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun infrastruktur, sehingga pendekatan pelaksanaan kebijakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis karena lebih memahami kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program. Kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak akan menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperluas jangkauan manfaat yang diterima masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi MBG tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut. (Kelola et al., 2026)

Pelaksanaan Program MBG di berbagai wilayah Indonesia juga menghadapi tantangan yang bersumber dari kondisi geografis negara yang sangat beragam. Daerah pedalaman, kawasan perbatasan, dan wilayah terpencil sering mengalami kendala dalam hal aksesibilitas sehingga distribusi bantuan tidak selalu berjalan lancar. Keterbatasan sarana transportasi dan jauhnya jarak tempuh menyebabkan proses penyaluran makanan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan daerah perkotaan. Selain itu, kondisi alam tertentu seperti pegunungan, pulau-pulau kecil, atau wilayah yang sulit dijangkau turut meningkatkan biaya distribusi dan pengawasan program. Hambatan tersebut dapat memengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat serta menyebabkan perbedaan tingkat keberhasilan program antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi implementasi yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah. Dengan pendekatan yang tepat, kendala geografis dapat diminimalkan sehingga tujuan program tetap dapat tercapai secara optimal. (Utami et al., 2026)

Keberadaan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Keterlibatan publik dalam berbagai tahapan program dapat membantu menciptakan pengawasan yang lebih efektif sekaligus mengurangi risiko terjadinya penyimpangan. Selain itu, dukungan masyarakat menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga

keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam pelaksanaan program, tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah cenderung meningkat. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian masukan, pengawasan distribusi bantuan, maupun keterlibatan dalam proses evaluasi program. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus mendorong terciptanya kolaborasi yang aktif antara masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam Program MBG. (Afriaji, 2026)

Secara umum, keberhasilan Program MBG merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi satu sama lain. Ketersediaan anggaran, kualitas koordinasi, kesiapan infrastruktur, efektivitas komunikasi, serta dukungan masyarakat merupakan elemen-elemen penting yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan program. Apabila salah satu komponen tersebut mengalami hambatan, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa program tetap berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus merumuskan solusi yang lebih tepat untuk memperbaiki pelaksanaan program. Di samping itu, peningkatan kualitas tata kelola dan kapasitas pelaksana perlu menjadi perhatian agar pelayanan dapat diberikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Program MBG berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. (Basuki et al., 2026)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat dipahami bahwa program tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi peserta didik. Program MBG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan anak sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kebijakan ini mencerminkan peran negara dalam memenuhi hak masyarakat atas kesehatan dan pangan yang layak sebagaimana konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam pelaksanaannya, Program MBG telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatnya pemenuhan gizi anak, membaiknya konsentrasi belajar siswa, meningkatnya motivasi belajar, serta berkurangnya beban pengeluaran keluarga. Program ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting dan masalah gizi buruk yang masih ditemukan di berbagai daerah. Selain berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, keberadaan MBG turut memberikan manfaat ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Meskipun demikian, implementasi

Program MBG masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan fasilitas sekolah, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kondisi geografis Indonesia yang luas juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan program dapat berjalan secara merata dan tepat sasaran. Di samping itu, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi penggunaan anggaran, efektivitas komunikasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting karena suatu kebijakan akan lebih mudah dijalankan apabila memperoleh legitimasi sosial yang baik. Oleh sebab itu, Program MBG dapat dinilai sebagai kebijakan strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional, namun pelaksanaannya tetap memerlukan evaluasi, pengawasan, dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, diperlukan berbagai langkah perbaikan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi makanan, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan akses transportasi yang terbatas, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat waktu dan merata. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana sekolah juga perlu menjadi perhatian, seperti penyediaan dapur sehat, ruang penyimpanan makanan, serta tenaga pengelola yang memiliki kemampuan memadai agar kualitas program tetap terjaga di setiap daerah. Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang dapat menghambat keberhasilan program. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan tidak menimbulkan perbedaan teknis di lapangan. Pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan strategi komunikasi publik dengan menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat mengenai tujuan serta mekanisme Program MBG. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial maupun media massa. Pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah agar kebijakan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program perlu terus ditingkatkan karena keterlibatan publik dapat membantu menciptakan transparansi dan menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Evaluasi secara berkala juga harus dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kekurangan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan sehingga pemerintah dapat segera melakukan perbaikan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta perbaikan sistem yang dilakukan secara berkelanjutan, Program MBG diharapkan mampu menjadi kebijakan publik yang efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat

Indonesia sekaligus mendukung terciptanya generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriaji, M. (2026). *Komunikasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kepercayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Publik*. 5(1), 302–311.
- Aktor, K. (2026). *Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah : Analisis Tata Kelola* ,. 9(September 2025), 2548–2553.
- Andi Weyana Nurul Khatimah, Syamsu A Kamaruddin, & A. Octamaya Tenri Awaru. (2025). *Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969–1976. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.815>
- Bangsaratu, A. R., & Edi, R. N. (2025). *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No . 401 . 1 Tahun 2025 dalam Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah (Studi di MIN 10 Bandar Lampung)*. 6(1), 140–148.
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., & Kusuma, N. A. (2026). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis : Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional*. 1413–1423.
- Fajrin, A. H., Nabila, Z., & Fatichul, A. (2026). *Dari Kebijakan ke Praktik : Kesiapan Lembaga dan Implementasi Makan Bergizi Gratis*. 18(1), 83–93.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). *Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan*. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>
- Febryanti, I., Indiaty, I., Pane, & Astuti, P. (2025). *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Studi Kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang*. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 067–079. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/26628>
- Governance, G., & Kualitatif, A. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai*. 5(1).
- Hastuti, R., & Hariyadi, A. M. (2026). *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah : Tinjauan Literature terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan*. 8(1), 16–21.
- Kebijakan Publik Di Era Disinformasi Studi Sosiologis Tentang, L., Satya Bhakti, P., Syarifuddin, D., Penelitian, A., Kunci, K., Kebijakan Publik, L., Bergizi Gratis, M., Masyarakat, P., & Publik, K. (2025). *Legitimasi Kebijakan Publik Di Era Disinformasi Studi Sosiologis Tentang Respons Masyarakat Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia: Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8435–8442. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9662>
- Kelola, T., Makan, K., Gratis, B., & Daerah, D. I. (2026). *PROGRAM NASIONAL DALAM SISTEM DESENTRALISASI: DINAMIKA TATA KELOLA KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH Neneng Sobibatu Rohmah*. 10, 156–169.

- Nabila Putri Ananta, D., Nadhira, S., & Bergizi Gratis, M. (2025). *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SMA Swasta Lancang Kuning Kota Dumai)* KATA KUNCI. 7(2), 335–349. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/>
- Nango, M., Purwoko, B., & Hazim, M. (2025). *Makan Bergizi Gratis : Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045*. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 25(2), 2085–0743. <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.991>
- Nasional, P., & Kabupaten, D. I. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi Bela Negara Dalam Meningkatkan Ketahanan*. *Jurnal Prinsip: Jurnal ...*, 2(1), 123–135. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/view/4727%0Ahttps://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/download/4727/1312>
- Nurulaini, R., & Afifah, D. F. (2025). *Implementasi Program MBG Untuk Meningkatkan Gizi Anak Sekolah Dasar di Kota Semarang 2025*. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(11), 4249–4259. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i11.32520>
- Pembangunan, B. P., Ratih, A., Adio, G., Maria, R., Pembangunan, B. P., & Kabupaten, D. (n.d.). *Jurnal Ekspos Program Makan Bergizi Gratis (MBG) : Kebijakan Pendukung Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*.
- Pujiyanto, A., & Solihat, M. (2026). *Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) : Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan*. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 7(1), 115–128. <https://doi.org/10.63447/jimik.v7i1.1675>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Risnawati, E., Suriasyah, A., & Mulya Budi Harsono, A. (2025). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Peningkatan Efektivitas Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar*. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(04), 832–842.
- Sabatimy, N., & Ardelia, V. (2026). *Hubungan antara Persepsi Masyarakat dengan Kecemasan terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis The Relationship between Public Perception and Anxiety toward the Implementation of the Free Nutritious Meal Program Abstrak*. 13(01), 258–269.
- Sari, V. N., Wijayanto, F., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2026). *Legal Theory EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (ANALISIS TATA KELOLA DAN PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA)*. 1105–1121.
- Syafaatu Azzahra, M., Nursanti, S., & Arindawati, W. A. (2025). *Analisis Framing Pemberitaan Pro Dan Kontra Program Makan Bergizi Gratis*. *Jurnal Professional*, 12(2), 775–785.
- Utami, A. M., Hasanah, N. U., Saputro, E. R., & Anita, A. (2026). *Legitimasi Negara dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Pedalaman Papua Selatan*. 4(4), 24764–24770.

- Yulia, W. S., Amelia, L., & Yudha, A. W. (2025). Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1727-1736. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20023/13637>
- Zubaedah, I., & Negara, P. A. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SEBAGAI STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN GIZI. 25(October).
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 426-435.